

**ABSTRAK**

Pungutan liar (pungli) merupakan pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi. Maraknya praktik pungli yang terjadi saat ini diakibatkan oleh pelaksanaan pelayanan publik yang tidak sejalan dengan prinsip good governance. Oleh karenanya dalam hal pemberantasan pungli di Indonesia dibentuk Satuan Tugas Saber Pungli (Satgas Saber Pungli). Regulasi terkait penegakan hukum pungli terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam praktiknya terdapat penerapan sanksi yang berbeda-beda oleh satgas saber pungli seperti ada yang dituntut pidana bahkan tindak pidana korupsi ada pula yang justru hanya mendapatkan teguran walaupun sama-sama dibuktikan melakukan pungli. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan ketidakpastian hukum pemberian sanksi Pungli di Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan perspektif hukum administrasi. Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak adanya regulasi khusus mengenai Pungli berdampak pada ketidakpastian dalam pemberian sanksi. Selain itu, tujuan pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan upaya pemberantasan pungli secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera, penerapan sanksi tindak pidana korupsi tersebut menjadi kontraproduktif antara tujuan memberikan pemidanaan pelaku untuk menimbulkan efek jera dengan biaya penyelidikan, penuntutan, dan operasional hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan yang lebih besar daripada biaya yang ditanggung oleh negara. Agar sejalan dengan tujuan tersebut seharusnya diberikan sanksi yang mengacu pada konsep restorative justice dalam hal ini selain dibebankan pengembalian keuntungan juga dikenakan sanksi administrasi.

**Kata Kunci:** Pungli; Ketidakpastian Hukum; Sanksi; *Restorative Justice*.

## ABSTRACT

Illegal levies are defined as giving something such as money or objects and certain facilities to government officials and individuals within an organization. The practice of illegal levies nowadays yet far from the principles of good governance in public services. To eradicate the practice of illegal levies Satuan Tugas Saber Pungli (Satgas Saber Pungli) was established. The law for illegal levies has been regulated in the KUHP and Law Number 20 of 2001. The implementation of sanctions given by Satgas Saber Pungli are different for one and another, one prosecuted for criminal acts of corruption, some only get a reprimand even though the same is proven to have done illegal levies. The purpose of this study was to analyze and explain the legal certainty of illegal levies sanctions in Sidoarjo using an administrative law perspective. This study used a typology of doctrinal research with a statue, conceptual, and case approach. Results revealed the absence of specific regulations regarding illegal levies has an impact on uncertainty imposing sanctions. Besides, the goal of establishing Satgas Saber Pungli is to eradicate illegal levies in a firm, integrated, effective, efficient, and capable of creating a deterrent effect. The application of criminal acts of corruption is counterproductive between the purpose of providing the punishment for the perpetrator to create a deterrent effect and the cost of investigations, prosecutions, and operational costs inside the correctional institution, which are way larger than the cost borne by the state. To be in line, sanctions given refers to the concept of restorative justice. In this case, apart from being charged for returning the profit, it is also subject to administrative sanctions.

**Keywords: Illegal Levies; Legal Uncertainty; Sanctions; Restorative Justice.**